

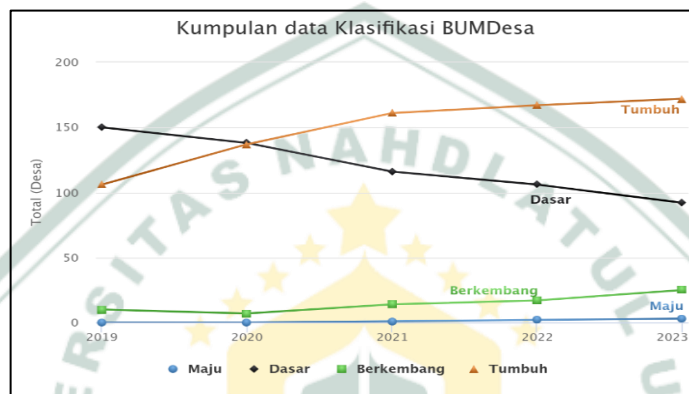
A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah sebuah proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan - tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes dirancang dengan mengedepankan peran dari Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih efektif dan proporsional. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah-langkah yang strategis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Di samping itu, perlunya memperhatikan potensi lokal serta dukungan kebijakan pemerintah di atasnya untuk mengantisipasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa yang disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Berdasarkan

data Sistem Informasi Desa per 26 Januari 2023, jumlah BUMDes di Kabupaten Brebes sejumlah 292, sebanyak 172 BUMDes masuk kategori tumbuh, 92 BUMDes kategori dasar, 25 BUMDes kategori berkembang dan hanya 3 BUMDes yang sudah maju.

Berikut gambar Data Klasifikasi BUMDesa di Kabupaten Brebes.

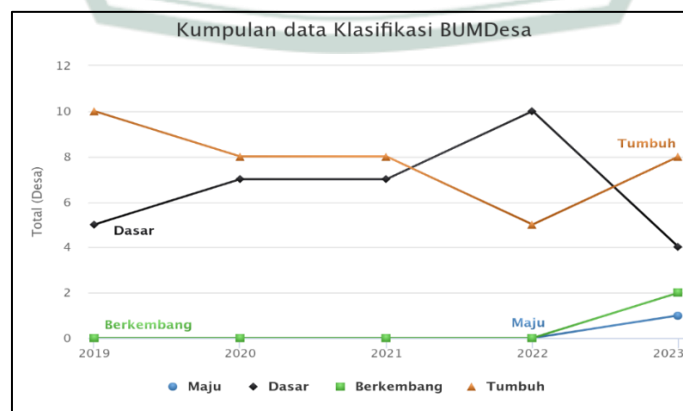


Gambar 1. Data Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Brebes per 26 Januari 2023

Sumber : Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data Sistem Informasi Desa per 26 Januari 2023, jumlah BUMDes di Kecamatan Bumiayu sejumlah 15, sebanyak 8 BUMDes masuk kategori tumbuh, 4 BUMDes kategori dasar, 2 BUMDes kategori berkembang dan hanya 1 BUMDes yang sudah maju.

Berikut gambar Data Klasifikasi BUMDesa di Kabupaten Brebes.



Gambar 2. Data Klasifikasi BUMDes di Kecamatan Bumiayu per 26 Januari 2023

Sumber : Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah

Desa Pruwatan adalah desa yang memiliki luas wilayah paling besar, dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Bumiayu. Di Desa Pruwatan sudah terbentuk BUMDes sejak tanggal 23 Desember 2017 berdasarkan badan hukum dengan nomor AHU-08389.AH.01.33 TAHUN 2022, dengan nama Badan Usaha Milik Desa “ PERINTIS PRUWATAN “ dengan data yang sudah terverifikasi badan hukum. BUMDes ini memiliki unit usaha yang beroperasi setiap hari dan minggunya. Dalam penyusunan unit usahanya, sumber modal awal BUMDes Perintis Pruwatan mengacu pada Dana Desa APBDES. Berikut penulis sajikan unit usaha BUMDes yang ada di Desa Pruwatan.

Tabel. 1 Jenis Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Pruwatan

No	Unit Usaha	Modal Awal	Tahun Berdiri
1	Pembuangan Sampah	Rp. 90.000.000	2017
2	Wifi	Rp. 50.000.000	2017
3	Brilink	Rp. 15.000.000	2019
4	Kios Sembako dll	Rp. 20.000.000	2018
5	Wisata	Rp. 100.000.000	2023
6	Pelayanan Pajak Kendaraan Dll.	Rp. 10.000.000	2024

Sumber : Pra Survei, 23 Juni 2024

Pertama, Usaha Pembuangan Sampah berdiri tahun 2017. Masyarakat mengumpulkan sampah di depan rumah masing-masing, lalu petugas BUMDes mengambil sampah tersebut 2x dalam seminggu. Dengan biaya Rp. 150.000/bulan untuk biaya operasional sampah. Kedua Usaha Wifi berdiri tahun 2017. BUMDes menyediakan peralatan wifi untuk dipasangkan ke pihak masyarakat/pribadi bagi yang berminat. Dengan harga pasang wifi Rp. 2.500.000, selanjutnya biaya setoran 150.000/bulan, Namun sampai saat ini masyarakat belum banyak yang berminat. Ketiga, usaha brilink melayani transfer, tarik tunai dan token listrik dengan jasa Rp. 5.000 juga melayani pulsa listrik dan pulsa All Operator. Keempat usaha kios sembako, menyediakan berbagai macam sembako dan kebutuhan rumah tangga dll. Kelima, wisata yang nantinya akan disediakan tempat mainan anak anak, track bersepeda keliling taman yang rindang, dengan aneka tanaman buah dan setiap minggunya akan

di gelar hiburan musik tradisional, seperti Tembang Jawa, hadroh, gamelan jawa, calung dan qosidah. Keenam pelayanan pajak kendaraan, melalui layanan pajak yang dikelola BUMDes ini, masyarakat yang hendak membayar pajak tidak perlu datang ke Kantor Samsat yang berjarak jauh, mereka cukup datang ke kantor BUMDes. Melihat dari banyaknya unit usaha BUMDes di Desa Pruwatan berharap bisa memberikan dampak bagus bagi desa dan mampu meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat desa, serta mengolah potensi desa yang ada. Meski demikian, pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ini belum berjalan secara optimal dan masih menemui sejumlah kendala. Hal ini terlihat dari beberapa indikator permasalahan berikut Pertama, kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah daerah juga dukungan berupa bantuan dana financial maupun non financial. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes belum mengadakan program khusus untuk pengenalan dan pengembangan BUMDes ke Pemerintah Desa, seperti bimbingan teknis mengenai BUMDes, pembinaan terhadap pengurus BUMDes, dan pelatihan pengelolaan BUMDes. Dengan pembinaan dan bimbingan tersebut diharapkan agar pelaksanaan BUMDes di Desa Pruwatan ini semakin berkembang. Kedua, belum efektifnya tingkat komunikasi yang terjalin antara BUMDes dengan Masyarakat Desa Pruwatan sehingga tingkat partisipasi masyarakat desa dalam turut serta mengembangkan usaha BUMDes Perintis Pruwatan masih rendah.

Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, Dengan tujuan khusus untuk meningkatkan integrasi dan koordinasi keberhasilan implementasi kebijakan BUMDes serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), implementasi kebijakan melibatkan pengembangan rencana strategi, partisipasi masyarakat serta pengelolaan sumber daya guna mengoptimalkan potensi desa, mengambil peluang ekonomi, serta memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini agar BUMDes dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan

bersama. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan yang diselenggarakan BUMDes Perintis Pruwatan dengan rumusan masalah, ***“Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perintis Pruwatan Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes”***.

Teori implementasi yang dirujuk dalam penelitian ini adalah model Edward III. Dalam pendekatan yang diterapkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (i) Komunikasi (ii) Sumber Daya (iii) Disposisi (iv) Struktur Birokrasi. Keempat variabel ini bekerja sama untuk membuat kerangka implementasi yang menyeluruh, yang memungkinkan BUMDes untuk menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

